



Survei Penerapan Manajemen Layanan Pendidikan Inklusi Dalam Proses Pembelajaran Pada Masa Pandemi Covid-19

Intan Komalasari^{1*}, A Wahab Jufri¹, Muntari¹

¹ Magister Administrasi Pendidikan, Pascasarjana Universitas Mataram, Indonesia.

DOI: [10.29303/jpap.v6i1.493](https://doi.org/10.29303/jpap.v6i1.493)

Sitasi: Komalasari, I., Jufri, A. W., & Muntari, M. (2022). Survei Penerapan Manajemen Layanan Pendidikan Inklusi Dalam Proses Pembelajaran Pada Masa Pandemi Covid-19. *JPAP (Jurnal Praktisi Administrasi Pendidikan)*, 6(1), 1–5. <https://doi.org/10.29303/jpap.v6i1.493>

*Corresponding Author:

Intan Komalasari, Magister
Administrasi Pendidikan,
Pascasarjana Unram, Indonesia
Email:

intankomalasari3101@gmail.com

Abstrak: Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perbedaan penerapan pelayanan pendidikan inklusi di masa pandemi Covid-19 di Sekolah Dasar. Dengan tiga kategori yaitu berdasarkan jenis kelamin, jabatan PNS atau Honorer, dan yang terakhir masa kerja. Penelitian ini menggunakan survey dengan pendekatan kualitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah 51 orang guru dengan sampel 44 orang guru. Pengumpulan data yang digunakan adalah kuesioner yang disebarkan melalui *google form*. Hasil dari penelitian berdasarkan data adalah penelitian tidak terdapat perbedaan antara jenis kelamin, status kepegawaian, dan masa kerja dalam penerapan layanan pendidikan inklusi di SD Kecamatan Jonggat pada masa pandemi Covid-19 berdasarkan dengan data yang ada pada variabel. Setiap guru memiliki kompetensi masing-masing dan bertindak sebagai fasilitator, motivator dan pembimbing.

Kata Kunci: Penerapan, Layanan Pendidikan, Pandemi Covid-19.

Pendahuluan

Pendidikan adalah hal terpenting bagi setiap negara untuk dapat berkembang pesat. Negara yang hebat akan menempatkan pendidikan sebagai prioritas pertamanya, karena dengan pendidikan, kemiskinan pada rakyat di negara tersebut akan dapat tergantikan menjadi kesejahteraan. Bagaimanapun, dalam perkembangannya, pendidikan di Indonesia senantiasa harus menghadapi beberapa masalah disetiap tahapnya. Masalah-masalah tersebut hanya dapat diselesaikan dengan partisipasi dari semua pihak yang terkait di dalam sistem pendidikan, seperti orang tua, guru-guru, kepala sekolah, masyarakat, dan juga peserta didik itu sendiri. Pada fase input, orang tua memiliki kontribusi besar dalam memperkenalkan nilai-nilai baik kepada anak-anak mereka. Orang tua bertanggung jawab penuh untuk mendidik anak-anak mereka dengan nilai-nilai kepemimpinan, sehingga mereka mempunyai bekal yang cukup untuk menjadi cikal bakal pemimpin ketika mereka mulai memasuki institusi formal, seperti

sekolah. Pada fase proses, orang tua bekerjasama dengan para guru dan kepala sekolah untuk memberikan penguatan kepada peserta didik dalam menerapkan nilai-nilai kepemimpinan yang baik melalui budaya organisasi di sekolah. Terakhir, pada tahap *output*, peserta didik harus menghadapi begitu banyak tantangan di dunia nyata, diluar sekolah. Peserta didik yang sudah melalui tahap-tahap sebelumnya di sekolah dengan budaya organisasi yang mengajarkan dan membiasakan nilai-nilai baik dalam hidupnya, maka akan tumbuh menjadi pemimpin yang hebat untuk negara ini (Megawati, 2012).

Pendidikan inklusi dinilai dapat menjadi jembatan untuk mewujudkan pendidikan untuk semua (*education for all*), tanpa ada seorangpun yang tertinggal dari layanan pendidikan. Pendidikan inklusi adalah pendidikan pada sekolah umum yang disesuaikan dengan kebutuhan siswa yang memerlukan pendidikan khusus pada sekolah umum dalam satu kesatuan yang sistemik. Sekolah inklusi menyediakan program pendidikan yang layak, menantang, tetapi disesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan setiap murid

© 2022 Published by Posgraduate University of Mataram.

This open access article is distributed under a *Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional*.

maupun bantuan dan dukungan yang dapat diberikan oleh para guru, agar anak-anak berhasil (Nashokha, tth), (Kemendikbud, 2012), Smart (2010).

Program pendidikan inklusi sudah diterapkan berorientasi terhadap pelayanan kepada anak, sehingga kebutuhan setiap anak terpenuhi. Program pendidikan inklusi tidak hanya diterapkan pada anak yang memiliki kebutuhan khusus tetapi untuk semua anak karena pada dasarnya setiap anak memiliki karakteristik, keunikan, dan keberagaman secara alamiah sudah ada pada diri anak. Karakteristik setiap anak ini yang harus difasilitasi dalam semua jenjang pendidikan pada umumnya dan pendidikan anak usia dini pada khususnya. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional yang mengatur setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan dasar yang bermutu baik yang mengalami kelainan fisik, mental, emosional, intelektual, memiliki bakat istimewa, dan yang tinggal di daerah terpencil. Undang-undang tentang sistem pendidikan ini menjelaskan bahwa pendidikan inklusi tidak hanya untuk anak-anak yang mengalami kebutuhan secara fisik tetapi juga untuk anak-anak yang mempunyai kebudayaan, sosial, geografi dan bahasa yang berbeda untuk mendapatkan layanan pendidikan yang sama sesuai kebutuhan setiap anak sehingga dapat menstimulasi perkembangan, pengetahuan dan keterampilan anak (Kusuma, 2017).

Manajemen sekolah akan efektif dan efisien apabila didukung oleh sumber daya manusia yang profesional. Sumberdaya yang profesional akan mampu mengelola organisasi sekolah secara baik. Mengelola kurikulum yang sesuai dengan tingkat perkembangan dan karakteristik masing-masing siswa, pembinaan sumber daya tenaga kependidikan yang handal, sarana prasarana yang memadai dalam mendukung kegiatan pembelajaran dan membina kerjasama kemitraan dengan masyarakat dan dunia usaha yang ada. Tidak kalah pentingnya adalah pengelolaan dana yang sesuai dengan fungsinya (Tarmansyah, 2007).

Apabila salah satu komponen tersebut diatas tidak berjalan sesuai dengan yang diharapkan atau tidak berfungsi sebagaimana mestinya, maka pengelolaan manajemen sekolah akan menjadi kurang efektif. Hal tersebut akan mengakibatkan hasil yang diharapkan menjadi kurang optimal.

Pemerintah kabupaten Lombok Tengah melalui Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga pada tanggal 24 September tahun 2012 telah mencanangkan sekolah penyelenggaraan pendidikan inklusif diikuti dengan diterbitkannya Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 93 tahun 2013 tentang Pendidikan khusus dan pendidikan layanan Khusus.

Berdasarkan data tahun 2018, terdapat 92 sekolah penyelenggara pendidikan di Kabupaten Lombok

Tengah dengan rincian sebagai berikut : Sekolah Dasar (SD) sebanyak 80 sekolah, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Sebanyak 10 sekolah , Sekolah Menengah Atas (SMA) sebanyak 1 dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sebanyak 1 sekolah.

Program penyelenggaraan pendidikan inklusif di SDN Kecamatan Jonggat menarik untuk diteliti karena SDN Kecamatan Jonggat merupakan sekolah pertama tingkat SD di Kabupaten Lombok Tengah yang dipercaya oleh Dinas Pendidikan dan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah sebagai sekolah penyelenggara program pendidikan pendidikan inklusif sejak tahun 2012 di deklarasi Lombok Tengah tetapi jauh sebelumnya SDN Kecamatan Joggat sudah menerima yang berkebutuhan khusus, dan masih konsisten melaksanakan pendidikan sampai saat ini dengan menghasilkan lulusan siswa berkebutuhan khusus yang berprestasi dan mampu melanjutkan ke sekolah yang lebih tinggi dan sukses hidup bersama-sama dalam masyarakat dengan tidak termarginalkan. Program pendidikan diadakan di SDN Kecamatan Joggat ini dilatarbelakangi karena ingin mensukseskan program pemerintah dalam penuntasan pendidikan dasar dan menengah dan juga memberikan kesempatan kepada semua anak (termasuk anak berkebutuhan khusus) untuk memperoleh pendidikan yang layak.

Berdasarkan obsevasi awal yang telah dilakukan melalui kepala sekolah dan guru pendamping yang menangani pendidikan inklusif, diperoleh informasi bahwa terdapat 16 anak berkebutuhan khusus dengan hambatan *down syndrome*, gangguan penglihatan, kesulitan belajar, motoric kasar, dan *low vision*, penyelenggaraan program pendidikan tidak mudah terdapat berbagai permasalahan yang terjadi. Antara lain masih banyak kelemahan dan kekurangan, khususnya dalam penerapan layanan manajemen misalnya manajemen layanan pendidikan, proses pembelajaran dan penanganan guru terhadap anak berkebutuhan khusus.

Dalam proses pembelajaran pada masa pendememi Covid-19 guru melaksanakan proses pembelajaran BDR (Belajar Dari Rumah) dengan pembelajaran luring (luar jaringan). Guru mengetahui hambatan anak, dan melakukan pembelajaran yang berbeda sesuai dengan kemampuannya dengan cara memberikan bacaan yang tulisannya diperbesar untuk anak yang mengalami hambatan membaca, dan anak yang *low vision*, menggunakan media yang konkret dan keterampilan khusus sesuai dengan kemampuannya untuk *down syndrome*, memberikan pemebelajaran K13 pada anak yang tuna daksa secara khusus dan pelayanan khusus, dan pada anak yang hambatan penglihatan menggunakan huruf braille dan media timbul.

Pendidikan inklusif merupakan sebuah solusi bagi peserta didik berkebutuhan khusus, namun dalam penerapan manajemen layanan pendidikan masih terdapat banyak kendala atau hambatan yang harus dihadapi yang menyebabkan layanan program pendidikan menjadi belum optimal. Untuk itu permasalahan ini menjadi penting untuk dikaji secara mendalam dalam hal ini pengelolaan penyelenggaraan pendidikan inklusi di SDN Kecamatan Jonggat Lombok Tengah dengan mengacu pada 8 standar Nasional Pendidikan yang disesuaikan dengan kebutuhan Peserta Didik Berkebutuhan Khusus (PDBK).

Berdasarkan fenomena ini penulis tertarik akan melakukan suatu penelitian dengan judul "Penerapan Manajemen Layanan Pendidikan Inklusi Dalam Proses Pembelajaran Dan Penanganan Guru Terhadap Anak Berkebutuhan Khusus Di SDN 1 Kecamatan Jonggat"

Dari penjelasan diatas menunjukkan bahwa anak berkebutuhan khusus berhak memperoleh kesempatan yang sama dengan anak lainnya (anak normal) dalam pendidikan. Namun dalam implementasinya kebijakan pendidikan di Indonesia sampai sekarang belum mampu menjangkau semua anak usia sekolah untuk mendapatkan akses pendidikan secara memadai terutama untuk anak-anak berkebutuhan khusus yang belum terpenuhi haknya untuk memperoleh pendidikan sebagaimana layaknya anak-anak lainnya.

Hasil dan Pembahasan

Hasil

Berdasarkan hasil statistik penerapan layanan pendidikan inklusi dilihat pada tabel 1.

No	Variable/kategori	N	Min	Max	Mean	Std
1	Jenis Kelamin					
	Laki-laki	18	42	80	66.33	13.861
	perempuan	33	48	80	71.39	10.068
2	Status Kepegawaian					
	PNS	27	42	80	66.44	13.177
	Honorar	24	52	80	73.17	8.646
3	Masa Kerja					
	<10	34	42	80	69.24	12.466
	>10	17	48	80	70.35	10.204

Sebelum melakukan uji hipotesis, terlebih dahulu dilakukan uji prasyarat yaitu uji normalitas dan uji homogenitas. Uji Normalitas dilakukan menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov. Hasil uji normalitas terlihat pada table 2.

Tabel uji normalitas 1.2

variabel	sig	α	Penjelasan
Manajemen Pendidikan	0.000	0,05	Tidak Normal

Metode

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah survey dengan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah suatu pendekatan penelitian yang mengungkapkan situasi sosial tertentu dengan mendeskripsikan kenyataan secara benar, dibentuk oleh kata-kata berdasarkan teknik pengumpulan data dan analisis data yang relevan yang diperoleh dari situasi yang alamiah pada bulan Agustus 2020 (Komariah dan Djam'an, 2010).

Penelitian ini dilakukan di SD Sekecamatan Jonggat. Subyek penelitian dipilih berdasarkan tujuan tertentu dari peneliti. Populasi penelitian adalah 51 orang guru di SD Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok tengah. Sampel minilan ditentukan sebanyak 44 orang guru dengan menggunakan rumus Issaac & Micheael (Sugiyono, 2015).

Instrument yang digunakan adalah instrument yang diadopsi dari Implementasi Manajemen Pendidikan Inklusi oleh Mahsun (2020) yang sudah di uji validitas dan reabilitasnya. Terdapat 20 pernyataan yang diisi oleh guru melalui *google form* yang dibagikan melalui whatsapp dan dari hasil penelitian dianalisis menggunakan SPSS 16.0.

Hasil uji normalitas pada tabel 2 menunjukkan nilai Sig (= 0,000) < 0,05. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sampel penelitian berasal dari populasi yang tidak berdistribusi normal. Karena data tidak berdistribusi normal, maka uji homogenitas tidak perlu dilakukan.

Karena data tidak berdistribusi normal, maka uji hipotesis menggunakan uji nonparametris, yaitu uji Mann-Whitney. Hasil uji hipotesis terlihat pada tabel 3

Uji hipotesis 3.

Uji hipotesis 3

No	Variabel/kategori	N	Mean	Sig	Penjelasan
1	Jenis Kelamin				
	Laki-laki	18	66.33	0,787	Ho diterima
perempuan	33	71.39			
2	Status				Ho diterima
	Kepegawaian				
	PNS	27	66.44	0,221	
	Honorar	24	73.17		
3	Masa Kerja				Ho diterima
	<10	34	69.24	0,792	
	>10	17	70.35		

Hasil uji hipotesis pada tabel 3:

H1 : Terdapat perbedaan yang signifikan pada Penerapan Layanan Pendidikan Inklusi di SD Kecamatan Jonggat pada masa pandemi Covid-19 berdasarkan jenis kelamin. Berdasarkan hasil uji Mann-Whitney menunjukkan nilai Sig (= 0,787) > 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan pada Penerapan Layanan Pendidikan Inklusi di SD kecamatan Jonggat pada masa pandemi Covid-19 antara jenis kelamin Laki-laki dan Perempuan.

H2 : Terdapat perbedaan yang signifikan pada Penerapan Layanan Pendidikan Inklusi di SD Kecamatan Jonggat pada masa pandemi Covid-19 berdasarkan status kepegawaian. Berdasarkan hasil uji Mann-Whitney menunjukkan nilai Sig (= 0,221) > 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan pada Penerapan Layanan Pendidikan Inklusi di SD kecamatan Jonggat pada masa pandemi Covid-19 antara status kepegawaian PNS atau Honorar.

H3 : Terdapat perbedaan yang signifikan pada Penerapan Layanan Pendidikan Inklusi di SD Kecamatan Jonggat pada masa pandemi Covid-19 berdasarkan masa kerja. Berdasarkan hasil uji Mann-Whitney menunjukkan nilai Sig (= 0,792) > 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan pada Penerapan Layanan Pendidikan Inklusi di SD kecamatan Jonggat pada masa pandemi Covid-19 antara masa kerja <10 dan >10 tahun.

Pembahasan

Dari hasil variable berdasarkan jenis kelamin tidak terdapat perbedaan Penerapan Layanan Pendidikan Inklusi antara jenis kelamin Laki-laki dengan Perempuan di SD Kecamatan Jonggat pada masa pandemi Covid-19 hal ini didukung dari hasil penelitian Eka Sari Setianingsih dan Ikha Listyarini (2019)

menyatakan bahwa tidak ada perbedaan karena disekolah regular tidak ada guru khusus yang menangani secara langsung anak yang berkebutuhan khusus dan menjadi tantangan bagi para guru untuk menemukan metode baru (kreatif) melalui kebersamaan, saling diskusi, dan saling berbagi, hal inilah yang membuat tidak ada terjadinya perbedaan antara jenis kelamin laki-laki dan perempuan.

Dari hasil variabel berdasarkan jenis kelamin tidak terdapat perbedaan Penerapan Layanan Pendidikan Inklusi antara status kepegawaian PNS dengan Honorar di SD Kecamatan Jonggat pada masa pandemi Covid-19 hal ini didukung dari hasil penelitian Husnul Khotimah (2015) menyatakan bahwa guru berperan aktif dalam proses pembelajaran baik didalam maupun diluar kelas. Guru harus memiliki kemampuan dalam mempertimbangkan keragaman dikelasnya. Hal inilah yang membuat tidak adanya perbedaan antara guru PNS dengan Honorar karena mereka sama-sama berperan aktif dalam proses pembelajaran.

Dari hasil variabel berdasarkan jenis kelamin tidak terdapat perbedaan Penerapan Layanan Pendidikan Inklusi antara status kepegawaian PNS dengan Honorar di SD Kecamatan Jonggat pada masa pandemi Covid-19 hal ini didukung dari hasil penelitian Evi Isna Yunita, Sri Suneki, Husni Wakhyudin (2019) menyatakan bahwa Guru menjadi faktor yang menentukan mutu pendidikan karena guru berhadapan langsung dengan para peserta didik dalam proses pembelajaran di kelas. Di tangan guru, mutu dan kepribadian peserta didik dibentuk. Karena itu, perlu sosok guru kompeten, bertanggung jawab, terampil, dan berdedikasi tinggi. Guru adalah kurikulum berjalan. Sebaik apa kurikulum dan sistem pendidikan yang ada tanpa didukung oleh kemampuan guru, semuanya akan sia-sia. Guru berkompoten dan bertanggung jawab, utamanya dalam mengawal perkembangan peserta didik sampai ke suatu titik maksimal. Tujuan akhir seluruh proses pendampingan guru adalah tumbuhnya pribadi dewasa yang utuh. Seiring dengan kemajuan teknologi informasi yang begitu pesat, guru tidak lagi sekedar bertindak sebagai penyaji informasi. Guru juga harus mampu bertindak sebagai fasilitator, motivator, dan pembimbing yang lebih. Inilah yang membuat tidak ada perbedaan antara masa kerja <10 dengan >10 tahun karena setiap guru memiliki keahlian tersendiri.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tidak terdapat perbedaan antara jenis kelamin, status kepegawaian, dan masa kerja dalam penerapan layanan pendidikan

inklusi di SD Kecamatan Jonggat pada masa pandemi COVID-19 berdasarkan dengan data yang ada pada variabel. Setiap guru memiliki kompetensi masing-masing dan bertindak sebagai fasilitator, motivator dan pembimbing.

Daftar Pustaka

- Direktorat Pembinaan PKLK Pendidikan Dasar. 2012. *Permendiknas Nomor 70 Tahun 2009*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Eka Sari Setianingsih, Ikha Listyarini. 2019. *Implementasi Pelaksanaan Pendidikan Inklusi*. Vol. 3 no 1 juni 2019
- Evi Isna, Sri Suneki, Husni. 2019. *Manajemen Pendidikan Inklusi Dalam Proses Pembelajaran Dan Penanganan Guru Terhadap Anak Berkebutuhan Khusus*. Volume 3. 15 July 2019
- Husnul Khotimah. 2019. *Problematika Pelaksanaan pembelajaran inklusi*. Volumr 5, no 2 september 2019
- Kusuma, Nurul. 2017. *Manfaat Program Pendidikan Inklusi Untuk Aud*. *Jurnal Pendidikan Anak*, Volume 6, Edisi 1, Juni 2017
- Megawati, Priarti. 2012. *Meretas Permasalahan Pendidikan Di Indonesia*. *Jurnal Formatif* 2(3): 227-234 ISSN: 2088-351X
- Nashokha, Imam. Tth. *Pendidik Saatnya Menjadikan Pendidikan Inklusi sebagai Alternatif Model Pendidikan untuk Semua*. <https://www.academia.edu/5078049>
- Smart, Aqila. 2010. *Anak Cacat Bukan Kiamat (Metode Pembelajaran Terapi untuk Anak Berkebutuhan Khusus)*. Jogjakarta: Kata Hati.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (22nd ed.). Bandung: Alfabeta
- Tarmansyah. 2007. *Pendidikan Inklusi Untuk Semua*. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional.
- Aan Komariah dan Djam'an Satori, 2010, *Metodologi Penelitian Kualitatif* Bandung: Alfabeta.